

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu rasio keserasian belanja operasi, rasio keserasian belanja modal, dan rasio keserasian belanja pegawai baik langsung maupun tidak langsung dapat disimpulkan bahwa :

1. Alokasi anggaran untuk belanja operasi pada Kabupaten Malaka tahun 2018–2022 tergolong Tidak Serasi.
2. Alokasi anggaran untuk belanja modal pada Kabupaten Malaka tahun 2018–2022 tergolong kategori Serasi.
3. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung pada Kabupaten Malaka tahun 2018-2022 tergolong kategori Serasi.

#### **5.2 Impikasi Teoritis**

Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode (Halim, 2001 : 164).

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (Hariadi,2010 : 25).

Anggaran Pendapatan adalah rencana penerimaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tanjung, 2002 : 90).

Anggaran Pendapatan adalah rencana penerimaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Mulyana, 2010 : 32).

### **5.3 Implikasi Terapan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti perlu memberi saran sebagai bahan pertimbangan bagi :

#### **1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka**

Diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Malaka agar memperhatikan konsep “keseimbangan antara unsur-unsur belanja” yang berorientasi pada penjaminan kualitas output pekerjaan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran belanja terutama pada belanja operasi sehingga pada tingkat keserasian belanja operasi pada tahun mendatang lebih diperhatikan.

#### **2. Peneliti Lain**

Untuk menunjang hasil penelitian ini maka diharapkan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian tentang keserasian belanja daerah pada fungsi yang lain seperti fungsi : Pelayanan Umum Pemerintah, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial.